

KATEGORI

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

SUB KATEGORI

Kependudukan

NAMA INDIKATOR

Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TAHUN

2017

KONSEP

- Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah banyaknya penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tingkat pendidikan dalam hal ini adalah SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dan perguruan tinggi (PT)/ sederajat.
- Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
- SD meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.
- SMP meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah (MTs), SMP kejuruan dan sederajat.
- SM meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan sederajat.
- PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I, II, III, IV dan sederajat.
- Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, yakni: pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- Menurut Permendagri No. 54 Tahun 2010 dan UU No. 20 Tahun 2003, jenjang pendidikan berdasarkan kelompok usia sekolah dibagi menjadi berikut:
SD/MI = 7-12 tahun
SMP/MTs = 13-15 tahun
SMA/MA/SMK = 16-18 tahun
PT/ sederajat = 19-22 tahun
- Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).

RUJUKAN

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
- Permendagri No. 54 Tahun 2010
- Renstra Kemdikbud tahun 2015-2019

RUMUS

Angka pendidikan yang ditamatkan = $\sum_h APT_h^t$, dengan $APT_h^t = \frac{p_h^t}{p^t} \times 100\%$.

Keterangan:

h = jenjang pendidikan (SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan PT/ sederajat)

t = tahun

P_h^t = jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan h pada tahun t

P^t = total jumlah penduduk pada tahun t

Teknik penghitungan

- Tahap pertama adalah dengan mendata terlebih dahulu jumlah penduduk di suatu wilayah yang mencapai jenjang pendidikan pada kelas/tingkat terakhir jenjang pendidikan SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan PT/ sederajat pada suatu tahun.
- Tahap kedua adalah mendata total jumlah penduduk pada suatu tahun tersebut.
- Tahap terakhir adalah dengan membagi perolehan data kuantitatif pada tahap pertama dengan tahap kedua, selanjutnya dikali dengan 100%.

WALI DATA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

UKURAN

Persen (%)

UNIT

Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil

KEGUNAAN

1. Mengetahui gambaran umum mengenai jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan;
2. Mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan tingkat pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya;
3. Penentuan kebijakan yang berkaitan dengan sektor lapangan usaha dimana dengan informasi pendidikan yang dimiliki penduduk, pemerintah akan lebih dapat menyediakan lapangan usaha yang sesuai dengan pendidikan penduduk umumnya;
4. Mengetahui kualitas sumber daya manusia (SDM) dikaitkan dengan program kebijakan lainnya seperti bidang kesehatan, penuntasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan.

INTERPRETASI

Semakin tinggi jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan, maka dapat menunjukkan bahwa penduduk tidak mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan di suatu wilayah.

KETERANGAN

Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Tingkat pendidikan seseorang masih dipengaruhi status ekonomi. Semakin tinggi status ekonomi

seseorang, semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Salah satu paradigma pembangunan pendidikan adalah Pendidikan untuk semua. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis (Renstra Kemdikbud tahun 2015-2019).

SUMBER

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) - Modul modul Sosial Budaya dan Pendidikan

METODOLOGI

1. Metode pemilihan sampel dalam studi ini dilakukan dalam 6 tahap. Pada tahap pertama dipilih 7 propinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban dan rural. Ketujuh propinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur (mewakili wilayah barat), Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (mewakili wilayah timur). Tahap kedua adalah memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing propinsi kecuali DKI Jakarta 3 kota secara purposive. Dari masing-masing kabupaten/kota, dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive. Sampai dengan tahap ketiga, pemilihan sampelnya dilakukan BPS Pusat.
2. Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa dilakukan oleh petugas BPS Propinsi dimana pada setiap kecamatan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratakan berdasarkan tingkat pendidikannya. Pemilihan sampel rumah tangga didasarkan pada hasil pendaftaran rumah tangga di masing-masing RT. Perhitungan interval sampel dan pemilihan angka random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih.
3. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami/istri, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

BPS RI

DOKUMEN

SIPD

